

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menganalisa bagaimana fungsi partai politik pengusung pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi dalam memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017. Dengan menggunakan kerangka pemikiran fungsi partai politik dari Miriam Budiardjo yaitu yang berkaitan dengan sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengelola konflik.

A. Fungsi Partai Politik dalam Memenangkan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017 diikuti oleh dua pasang kandidat yang mencalonkan dirinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, yaitu nomor urut satu Dodi Reza yang berpasangan dengan Beni Hernedi dan nomor urut dua yaitu Amiri Aripin yang berpasangan dengan Ahmad Toha.

Pada pilkada sebelumnya Dodi Reza juga mencalonkan dirinya sebagai calon Bupati Musi Banyuasin tetapi ia dikalahkan oleh pasangan Pahri Azhari dan Beni Hernedi. Lalu pada pilkada tahun 2017 Dodi Reza kembali mencalonkan dirinya sebagai calon Bupati Musi Banyuasin dan berpasangan dengan Beni Hernedi. Pada pilkada Musi Banyuasin tahun 2017 ini pasangan Dodi Reza dan Beni ditetapkan sebagai pemenang.

Pada pemilihan tersebut pasangan dengan nomor urut 1 diusung oleh 11 (sebelas) partai politik yaitu diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia

Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan pasangan dengan nomor urut dua berasal dari jalur Independen. Pada pemilihan tersebut seluruh partai politik yang mengikuti pilkada di Kabupaten Musi Banyuasin berkoalisi dengan Dodi Reza dan Beni Hernedi.

Partai politik mempunyai peranan penting dalam sebuah kompetisi pemilihan kepala daerah, karena fungsi utama dari partai politik itu sendiri untuk mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan serta mempertahankan kekuasaan. Cara partai politik memperoleh kekuasaan yaitu dengan cara berpartisipasi dalam pemilihan, termasuk dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017.

Terdapat 11 (sebelas) partai politik yang mengikuti pilkada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017. Ke 11 (sebelas) partai politik tersebut berpartisipasi dalam pilkada Musi Banyuasin tahun 2017 dengan mengusung paslon nomor urut satu yaitu pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi. Koalisi yang dilakukan oleh ke 11 (sebelas) partai politik tersebut tentu memiliki pertimbangan tersendiri sehingga memutuskan untuk mendukung pencalonan Dodi Reza dan Beni Hernedi.

Dalam politik, kepentingan adalah hal yang abadi. Hal ini terbukti dari koalisi yang dibangun antar partai politik dalam pilkada Musi Banyuasin 2017. Tentunya dalam berkoalisi keuntunganlah yang menjadi pertimbangan. Dari ke

11 (sebelas) partai politik itu juga menganggap bahwa pasangan terkuat dari pada paslon yang lain, sehingga menarik perhatian sebelas partai politik untuk bergabung dalam barisan koalisi paslon Dodi Reza dan Beni Henedi.

Bagi paslon Dodi Reza dan Beni Henedi, partai politik dianggap penting dalam pemenangan mereka dalam pilkada Musi Banyuasin 2017. Dalam tulisan ini akan diuraikan fungsi dari partai politik dalam sebuah kontestasi pilkada. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah dari Miriam Budiardjo yang menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengelola konflik.

1. Sarana Komunikasi Politik

Sarana komunikasi politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekankan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Peran partai politik adalah menjadi wadah penggabungan aspirasi masyarakat yang senada agar dapat dirumuskan secara lebih terstruktur atau teratur. Selanjutnya, tugas partai politik adalah merumuskan aspirasi tersebut menjadi sebuah usulan kebijakan untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik.¹

Sebagai contoh dari permasalahan ini adalah seperti yang disampaikan oleh Dewi Kurniasih dan Tatik Rohmawati dalam majalah ilmiah UNIKOM yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik Partai Demokrat (studi pemilihan Walikota Bandung 2013) dalam proses mengimplementasikan fungsi komunikasi politik, partai Demokrat sempat

¹ Op Cit, Miriam Budiardjo. h.405

memiliki hambatan-hambatan diantaranya adalah sering terjadi miskomunikasi antar kader saat menyampaikan program-program partai politik atau menerima aspirasi dari masyarakat.²

Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dari partai Demokrat Kota Bandung karena anggota partai Demokrat yang memiliki kualitas pendidikan yang masih rendah sehingga untuk mengatasi hal itu Dewan Pengurus Cabang Demokrat (DPC) kota Bandung melakukan pendidikan politik yang diadakan dengan jadwal tersendiri secara khusus dan terpisah dari agenda-agenda lainnya. Hal ini berdampak positif terhadap pengetahuan anggota partai terhadap fungsi-fungsi partai politik terutama fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Menurut Miriam Budiardjo dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang denganya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Sosialisasi politik adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.

Sosialisasi politik juga merupakan proses yang digunakan oleh masyarakat, untuk menyampaikan budaya politik yaitu norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya

² Dewi Kurniasih & Tatik Rohmawati, *Peaksanaan Fungsi Komunikasi Politik Partai Demokrat (studi pemilihan Walikota Bandung 2013)*. Vol 11 No 2, h. 234

politik suatu bangsa.³ Sisi lain dari fungsi sosialisasi partai politik adalah upaya untuk menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai politik harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.

Hal paling utama apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi politik yakni mendidik anggota - anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menepatkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada saat memenangkan Pilkada tahun 2013 di Kabupaten OKI dengan mengusung pasangan Iskandar, SE dan M.Rifai, SE. Langkah pertama yang dilakukan oleh Partai Amanat Naional adalah membentuk tim koalisi dengan partai lain sehingga terbentuklah koalisi empat partai yaitu PAN, Hanura, Gerindra dan PKB.⁴

Adanya koalisi partai ini kemudian dimanfaatkan untuk mensosialisasikan program-program unggulan paslon dengan cara menjalin komunikasi dan silaturahmi dari desa kedesa selain itu, disosialisasikan juga program-program yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat OKI. Sehingga dengan sosialisasi politik yang baik yang

³*Ibid*, h.407

⁴ M. Aprizal, (2017),*Strategi Partai Amanat Nasional Dalam Memenangkan Pemilu Di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2013*, Yogyakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

dilakukan oleh koalisi partai tersebut pasangan Iskandar, SE dan M.Rifai, SE berhasil memenangkan pilkada OKI 2013 dengan perolehan suara 124.050 yang mengungguli lima paslon lainnya. Perolehan suara pada Pilkada OKI 2013 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III.1
Perolehan Suara Sah Masing-masing pasangan calon Pilkada OKI 2013

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bahir Alamsyah, S.IP berpangan dengan Drs Bahrudin Ali	7.101
2	Sri Anggraini berpasangan dengan Suyaman, A.Ma	10.570
3	Zaitun Mawardi, SH., M.Kn berpasangan dengan Ir.H. Herman Thalib, MM	95.930
4	Iskandar. SE berpasangan dengan M. Rifai, SE	124.050
5	Hj. Tartila Ishak berpasangan dengan Arif Ahkadi, S. Sos, MM	102.858
6	H.M. Yusuf Mekki, S. Sos berpasangan dengan Tri Kuncoro Hadi Lukito	63.344

Sumber: KPU Ogan Komering Ilir 2013

Melalui sosialisasi politik yang baik dengan partai lain untuk membentuk koalisi serta sosialisasi yang berjalan baik dengan cara menemui masyarakat dari desa kedesa dan menyampaikan program pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah poin-poin penting sosialisasi politik PAN untuk memenangkan Paslon yang diusungnya dan hal itu terbukti efektif dengan pasangan Iskandar, SE dan M. Rifai, SE.

3. Sarana Rekrutmen politik

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah kepemimpinan baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partainya butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan

kader yang demikian ia akan menjadi partai yang mempunyai kesempatan paling besar untuk mengembangkan diri dengan mempunyai kader-kader yang baik, cerdas, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain itu, partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan maka partai berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Rekrutmen politik menjamin keberlangsungan dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk melatih calon-calon pemimpin.

Proses rekrutmen politik terdiri dari beberapa cara yaitu:

- 1) Seleksi pemilihan melalui ujian
- 2) Latihan (training) hal tersebut menjadi indikator utama didalam perekrutan politik
- 3) Penyortiran (memilih yang terbaik)
- 4) Rotasi memiliki tujuan mencegah terjadinya dominasi jabatan dari kelompok-kelompok yang berkuasa maka perlu adanya pergantian secara periode dalam jabatan-jabatan politik.
- 5) Petronag artinya suatu jabatan dapat dibeli dengan mudah melalui relasi-relasi terdekat.
- 6) Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru) artinya memasukkan orang-orang atau anggota baru untuk menciptakan pemikiran

yang baru sehingga membawa suatu partai pada visi dan misi yang ditujunya.

Adapun contoh dari rekrutmen politik yang baik yang dilakukan oleh partai politik adalah seperti contoh yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada pilkada di Kabupaten OKI 2013. Dimana partai PAN dengan keyakinannya mencalonkan kadernya sendiri Iskandar, SE hal ini diputukan oleh PAN karena Iskandar, SE merupakan kader terbaik mereka yang siap untuk memimpin Kabupaten OKI. Selain itu, PAN juga mengklaim bahwa Iskandar, SE merupakan kader yang disenangi masyarakat dan memiliki karismatik sebagai calon pemimpin.

Keputusan PAN ini mencalonkan kadernya sendiri yang dianggap memumpuni mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin OKI ternyata mendapat respon yang baik dari masyarakat dan terbukti dengan kemenangannya pada Pilkada OKI tahun 2013 dan mengalahkan lima paslon lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sebuah partai memiliki kader-kader yang baik tentu partai tersebut akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mencalonkan kadernya sendiri sebagai pemimpin masyarakat.

Sebaliknya jika sebuah partai tidak memiliki kader yang memadai maka tidak akan ada kepercayaan diri dari partai tersebut untuk mencalonkan kadernya sehingga partai tersebut lebih memilih berkoalisi dengan partai lain dan mendukung paslon yang diusung oleh partai tersebut.

4. Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi dimasyarakat terdiri dari berbagai macam etnis (suku bangsa, sosial ekonomi ataupun agama). Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar.

Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elit partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi terhadap tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang diberbagai kelompok masyarakat. Pelaksanaan fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di negara demokrasi. Karena dipihak lain dapat dilihat bahwa seringkali partai malah mempertajam pertentangan yang ada jika hal ini terjadi maka dapat membahayakan stabilitas politik.

Contoh dari permasalahan ini adalah seperti yang ditulis oleh Alex Sander dalam skripsinya yang berjudul Marketing Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten OKI

tahun 2018, yang mengatakan bahwa partai PDI-P pada pilkada tahun 2018 mencalonkan pasangan Abdiyanto dan Made Indrawan, hal ini dianggap efektif untuk meredam konflik antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Seperti yang diketahui bahwa Abdiyanto merupakan putra daerah Kabupaten OKI sementara Made Indrawan merupakan suku pendatang yaitu suku Bali.⁵

Dengan mengajukan paslon ini diharapkan agar tidak terjadinya konflik antara masyarakat mayoritas dan minoritas sehingga masyarakat menilai partai PDI-P merupakan partai yang peduli terhadap kaum mayoritas maupun minoritas. Sehingga masyarakat akan simpati dan memilih pasangan calon yang diusung oleh partai PDI-P tersebut. Hal ini terbukti dengan perolehan suara Abdiyanto dan Made Indrawan yang mencapai 32,92% padahal hanya diusung oleh satu partai saja sementara pemenang pilkada pasangan Iskandar dan M Dja'far Sodik yang merupakan petahana dan diusung oleh lima partai hanya mendapatkan perolehan suara 46,80%.

Adapun contoh yang lain misalnya terjadi sengketa lahan antara pemerintah dengan masyarakat ketika adanya pembangunan proyek pemerintahan, partai politik hadir untuk menjadi penengah dari permasalahan tersebut, agar ditemukan suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

⁵Alex Sander, (2019),*Marketing Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ogan Komering Ilir Tahun 2018*, Palembang : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

B. Fungsi partai politik pengusung paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi dinilai dari hasil perolehan suara pada Pilkada Musi Banyuasin 2017

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan mengenai apa saja yang peneliti temukan di lapangan, siapa saja yang menjadi objek penelitian serta peneliti akan menganalisis semua permasalahan yang ada menggunakan 4 (empat) fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo.

Dalam proses Pilkada fungsi partai sangat diperlukan untuk memenangkan kontestasi Pilkada. Dengan adanya fungsi partai yang baik dan berjalan sesuai dengan fungsi partai politik yang sesungguhnya maka apa yang menjadi tujuan bersama dari partai politik akan mudah untuk direalisasikan.

Pada tahap ini peneliti akan menganalisis bagaimana ke 6 (enam) partai politik pengusung Dodi Reza dan Beni Hernedi yaitu Golkar, PDIP, Demokrat, Nasdem, PKB dan Hanura dalam menjalankan fungsi partai berdasarkan 4 (empat) fungsi partai menurut Miriam Budiardjo.

Pembahasan pertama peneliti adalah partai Golkar, karena Dodi Reza yang maju sebagai Bupati Musi Banyuasin merupakan kader dari partai Golkar. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis partai Golkar terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana partai Golkar menjalankan fungsi partai terutama dalam memenangkan kadernya.

Partai Golkar melakukan langkah-langkah untuk memenangkan paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi. Seperti halnya sosialisasi politik, partai Golkar mengikut sertakan Setya Novanto yang menjabat sebagai ketua DPR RI sekaligus ketua umum DPP Partai Golkar pada saat itu untuk ikut serta secara

langsung dalam agenda sosialisasi politik, yang juga dimeriahkan oleh artis ibukota. Setya Novanto bersama dengan DPD partai Golkar melakukan sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat agar memilih pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi pada Pilkada Musi Banyuasin 2017.

Gambar III.1
Kampanye Partai Golkar Bersama Setya Novanto



Gambar tersebut merupakan salah satu agenda kampanye akbar yang dilaksanakan di alun-alun gelanggang remaja kota Sekayu yang diikuti oleh partai Golkar dalam rangka mensosialisasikan paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi kepada masyarakat Musi Banyuasin. Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP partai Golkar ikut serta secara langsung dalam agenda akbar tersebut dengan tujuan agar menarik simpati masyarakat Musi Banyuasin. Partai Golkar memang secara maksimal berusaha untuk selalu mensosialisasikan paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi kepada masyarakat, hal itu dianggap wajar karena Dodi Reza sendiri merupakan kader dari partai Golkar.

Gambar III.2
Kampanye Dodi Bersama Partai Golkar



Gambar diatas juga merupakan agenda sosialisasi yang dilakukan oleh partai Golkar bersama dengan Dodi Reza yang mensosialisasikan program kerja mengenai jalan dan listrik. Dalam setiap agenda sosialisasi seperti itu partai Golkar selalu ikut serta mendampingi paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi.. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jendral DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Banyuasin Bpk M Rusli Mahdi yang mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan oleh partai Golkar untuk memuat program-program yaitu dengan datang ke desa dan Kecamatan di seluruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan program kampanye dialogis, datang keseluruhan audien ini diikuti oleh seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga masyarakat tahu bahwa pak Dodi dan Beni itu diusung oleh seluruh partai, dan kami juga menjual program-program semacam kesehatan, pendidikan, air bersih dan program – program yang kira-kira dapat dilaksanakan oleh Dodi Reza dan Beni Hernedi setelah beliau menjadi Bupati dan Wakil Bupati.”⁶

Jika dilihat dari fungsi sosialisasi politik, partai Golkar sudah cukup baik dalam melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat, namun yang menjadi kekurangan dari sosialisasi partai Golkar tersebut adalah sosialisasi politik yang hanya dilakukan pada saat kampanye pilkada saja dan tidak dilakukan secara terus menerus dihari-hari yang lain.

⁶ Wawancara dengan Sekretaris Jendral DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Banyuasin, Bpk M Rusli Mahdi pada 13 Mei 2019, pukul 10:12

Fungsi selanjutnya yang akan dianalisis oleh peneliti yaitu fungsi rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai Golkar. Jika melihat dari Pilkada Musi Banyuasin 2017 rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai Golkar sudah cukup baik, hal ini karena paslon yang diusung merupakan kader dari partai Golkar itu sendiri. Selain itu, partai Golkar juga dalam hal rekrutmen ini cukup aktif dalam merekrut partai-partai yang lain untuk ikut serta mengusung Dodi Reza sebagai calon Bupati Musi Banyuasin 2017.

Adapun dalam hal komunikasi politik, partai Golkar sebenarnya juga sudah cukup baik dalam mengimplementasikan fungsi partai sebagai komunikasi politik pada Pilkada Musi Banyuasin 2017. Namun kembali lagi bahwa partai Golkar hanya melakukan fungsi Komunikasi Politiknya pada saat pilkada saja dan tidak ada program-program khusus yang berkenaan dengan komunikasi politik yang diadakan diluar masa Pilkada.

Adapun dalam hal sarana pengendali konflik, partai Golkar tidak memiliki beban yang cukup berat dalam hal pengendalian konflik ini karena Kabupaten Musi Banyuasin itu sendiri merupakan Kabupaten yang jauh dari pemberitaan mengenai adanya konflik baik suku, ras, agama serta konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, partai Golkar sebagai partai pengusung utama paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi memiliki tugas yang berat untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi alasan masyarakat tidak ikut serta dalam Pilkada Musi Banyuasin 2017.

Dari ke 4 (empat) fungsi partai politik yang dijalankan oleh partai Golkar tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal rekrutmen politik partai Golkar sudah

cukup baik karena berani mencalonkan kadernya sendiri serta bisa mengajak partai-partai yang lain untuk mengusung kadernya, namun dalam hal sosialisasi politik ada titik kelemahan dari partai Golkar, karena partai Golkar hanya melakukan sosialisasi politik secara aktif pada saat Pilkada saja sehingga, alasan upaya membuat program melalui kampanye dialogis hanya sekedar formalitas saja dan tidak sungguh-sungguh mengambil aspirasi masyarakat sebagai suatu program.

Dalam hal sosialisasi politik partai PDIP juga melakukan agenda-agenda tertentu untuk memenangkan paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi Seperti yang disampaikan oleh Sekertaris Jendral Dewan Pengurus Cabang partai PDIP Kabupaten Musi Banyuasin. Bpk Jon Kenedi yang menyatakan bahwa

“kami dari partai PDIP sudah melakukan beberapa hal untuk mensosialisasikan paslon Dodi Reza dan Beni Henedi mulai dari memberikan peintah atau instruksi terhadap seluruh kader PDIP hingga terjun langsung kelapangan dan mensosialisasikan apa saja yang menjadi program dari Dodi Reza dan Beni Hernedi ini. Menemui masyarakat secara langsung menurut kami merupakan suatu yang efektif untuk menyampaikan apaapa yang menjadi program kerja Dodi Reza dan Beni Hernedi.”⁷

Dari apa yang disampaikan oleh Sekjen DPC partai PDIP Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, dapat diketahui bahwa partai PDIP mengerahkan seluruh kader-kadernya untuk semaksimal mungkin mensosialisasikan apa yang menjadi program-program dari paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi selain itu, para petinggi partai juga ikut serta dalam sosialisasi politik tersebut agar lebih menyakinkan masyarakat bahwa program-program yang dijanjikan oleh

⁷ Wawancara dengan Sekretaris Jendral DPC Partai PDIP Gatot, pada 25 April 2019, pukul 10:03 WIB

Dodi Reza dan Beni Hernedi merupakan program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh partai PDIP pada Pilkada Musi Banyuasin 2017 tersebut dapat kita lihat melalui beberapa gambar dibawah ini

Gambar III.3
Kampanye PDIP dalam Mengusung Dodi Reza



Gambar diatas merupakan kampanye yang dilakukan oleh partai PDIP di desa Suka Maju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dalam agenda mensosialisasikan paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi. Pada kampanye tersebut turut hadir beberapa pengurus DPC partai PDIP yang juga ikut serta dalam agenda sosialisasi tersebut. Sosialisasi yang dilakukan partai PDIP ini dilakukan dengan tatap muka langsung bersama masyarakat serta menyampaikan program-program unggulan apa saja yang dimiliki oleh paslon tersebut. Setelah itu, masyarakat akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan masukan terhadap program-program yang dijanjikan oleh paslon tersebut.

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai PDIP tersebut secara konsisten dilakukan di beberapa desa yang lain di Kabupaten Musi Banyuasin, contoh lain juga bisa dilihat dari sosialisasi politik partai PDIP di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin dibawah ini

Gambar III.4
Kunjungan ke Masyarakat Beni Hernedi Saat Kampanye



Gambar diatas merupakan kampanye politik yang dilakukan oleh partai PDIP di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini juga dilakukan dalam rangka mensosialisasikan visi dan misi paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi. Dalam kegiatan tersebut pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi didampingi langsung oleh Dewan Pengurus Cabang PDIP Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun dalam hal rekrutmen politik, partai PDIP sebenarnya sudah cukup baik dengan mengajukan kadernya yaitu Beni Hernedi untuk mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Musi Banyuasin mendampingi Dodi Reza. Namun, sebenarnya partai PDIP memiliki peluang yang sangat besar untuk mencalonkan Beni Hernedi sebagai calon Bupati Musi Banyuasin karena sebelumnya Beni merupakan Wakil Bupati Musi Banyuasin Periode pertama sejak 15 Januari 2012 hingga 24 Desember 2015 dan ia juga pernah menjabat

sebagai pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin 24 Desember 2011 hingga 15 Januari 2017.

Dengan status Beni Hernedi sebagai petahan, dan Dodi Reza sebagai lawan politik yang sempat dikalahkannya pada Pilkada Musi Banyuasin 2012 seharusnya partai PDIP lebih percaya diri mencalonkan Beni Hernedi sebagai calon Bupati bukan sebagai Wakil Bupati dari Dodi Reza. Jika PDIP memberanikan diri mencalonkan Beni Hernedi sebagai calon Bupati Musi Banyuasin 2017 tentu akan memunculkan persaingan yang sehat dan akan menimbulkan keinginan dari masyarakat untuk memilih.

Namun yang terjadi adalah partai PDIP malah menjadikan Beni Hernedi sebagai calon Wakil Bupati dari Dodi Reza. Sehingga paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi diusung oleh 2 partai yaitu Golkar dan PDIP ditambah 9 (sembilan) partai politik yang lain, sementara lawan politiknya Amiri Aripin dan Ahmad Toha merupakan pasangan yang independen. Hal ini menyebabkan persaingan politik yang tidak menarik yang mengakibatkan masyarakat bosan dan tidak berkeinginan untuk ikut serta dalam Pilkada Musi Banyuasin 2017. Sehingga hal tersebut terbukti dengan jumlah golput yang mencapai 42 %.

Adapun dalam hal komunikasi dan pengendalian konflik partai PDIP memiliki kesamaan dengan partai Golkar karena PDIP hanya aktif melakukan komunikasi politik pada saat kampanye saja.

Sosialisasi juga dilakukan oleh partai Nasdem yang bebar-benar melakukan sosialisasi politik secara maksimal, hal ini terbukti dengan keikutsertaan Syahril Oesman sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah partai

Nasdem Sumatera Selatan, dalam agenda sosialisasi politik yang dilakukan oleh pengurus partai Nasdem Kabupaten Musi Banyuasin.

Gambar III.5
Kampanye Dodi dan Beni Bersama Partai Nasdem



Gambar diatas menunjukkan bahwa partai Nasdem benar-benar melakukan sosialisasi politik secara maksimal untuk memenangkan paslon Dodi Reza dan Beni Henedi. Dengan keikutsertaan Ketua DPW Partai Nasdem tersebut tentu menimbulkan motivasi tersendiri dari kader-kader partai Nasdem terutama Dewan Pegurus Daerah Partai Nasdem Kabupaten Musi Banyuasin, untuk lebih maksimal lagi dalam rangka memenangkan paslon yang mereka usung. Dalam hal fungsi partai politik sebagai sosialisasi politik partai Nasdem juga sudah melakukan hal yang cukup baik dengan keikutsertaan pegurus wilayah dan memaksimalkan kader-kader yang ada untuk mensosialisasikan paslon yang diusung.

Dalam hal rekrutmen politik partai Nasdem mempunyai kelemahan karena rekrutmen politik yang dilakukan partai Nasdem kurang berjalan dengan baik di Kabupaten Musi Banyuasin. Bahkan partai Nasdem hanya memiliki 2 kursi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang membuat partai Nasdem kesulitan untuk mencalonkan kadernya sendiri serta harus berkoalisi dengan

partai lain. Adapun dalam hal komunikasi politik Bpk Edi Setiawan Sekretaris

Jendral DPC Partai Nasdem menyampaikan bahwa:

“partai Nasdem mengerahkan kader-kadernya untuk *All Out* untuk menerima aspirasi dari masyarakat agar paslon yang diusung benar-benar bisa mewakili kepentingan dan keinginan dari masyarakat”

Dari penjelasan Sekretaris Jendral DPC Partai Nasdem Kabupaten Musi Banyuasin diatas dapat dipahami bahwa partai Nasdem sudah mengerahkan kader-kadernya untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat serta menyampaikan program-program yang dijanjikan oleh paslon yang mereka usung agar masyarakat merasa diikutsertakan dalam setiap program-program yang dibuat.

Adapun dalam hal pengendalian konflik, partai Nasdem juga memiliki tanggung jawab yang sama seperti partai Golkar dan PDIP untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat agar tidak menimbulkan suatu konflik yang lebih besar lagi, upaya tersebut sudah dilakukan oleh partai Nasdem dengan adanya komunikasi politik yang dilakukan oleh partai Nasdem di desa-desa.

Dari ke 4 (empat) fungsi partai politik yang dilakukan oleh partai Nasdem diatas dapat dipahami bahwa kelemahan dari partai Nasdem adalah pada tahap rekrutmen politik dimana partai Nasdem tidak secara aktif melakukan pengkaderan atau melakukan pendidikan kader agar memunculkan kader-kader yang berkualitas, sehingga membuat partai Nasdem kesulitan untuk bersaing dengan partai – partai lain dan memutuskan untuk bergabung dengan partai-partai yang lain untuk mengusung pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi.

Dalam hal komunikasi politik juga partai Nasdem memiliki kelemahan karena kader-kader yang memiliki kualitas yang rendah menyebabkan penyampaian komunikasi politik yang kurang baik sehingga sulit dipahami oleh masyarakat, serta sering terjadinya miskomunikasi pusat dan daerah. Permasalahan ini sebenarnya sama dengan yang dialami oleh DPC partai Demokrat Kota Bandung namun, DPC Partai Demokrat Kota Bandung mengatasi permasalahannya dengan melakukan pendidikan politik secara khusus kepada kader-kadernya dan berhasil membuat kualitas kadernya lebih baik.

Partai Demokrat yang juga merupakan partai pengusung pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi dalam menjalankan fungsi partai politik sebagai sosialisasi politik juga memiliki cara-cara tersendiri yaitu dengan memberi informasi serta instruksi kepada seluruh petugas-petugas ranting partai Demokrat yang ada di desa untuk mensosialisasikan program Dodi Reza dan Beni Hernedi yang maju dalam Pilkada 2017. Sekretaris Jendral DPC Partai Demokrat Kabupaten Musi Banyuasin juga mengatakan bahwa mereka merancang pemetaan disetiap desa maupun disetiap Kecamatan untuk pemenangan calon yang mereka usung.

Dari apa yang sudah dilakukan partai Demokrat berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari Sekretaris Jendral DPC Partai Demokrat dapat diketahui bahwa partai Demokrat sudah menjalankan fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik pada saat Pilkada Musi Banyuasin 2017 dengan cara pemetaan pemenangan disetiap desa dan Kecamatan serta memberikan instruksi kepada seluruh petugas-petugas ranting untuk mensosialisasikan

program Dodi Reza dan Beni Hernedi. Adapun dalam hal komunikasi politik, partai Demokrat yang diwakili Sekretaris Jendral DPC Demokrat Kabupaten Musi Banyuasin mengatakan bahwa:

“pada saat melakukan komunikasi dengan masyarakat kami melakukan upaya yang lebih konkrit, kita turun kelapangan dan menyapa masyarakat dan memberikan informasi bahwasanya pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi adalah pasangan yang terbaik dan pantas dipilih oleh masyarakat.”⁸

Dari apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jendral DPC Partai Demokrat Kabupaten Musi Banyuasin tersebut dapat diketahui bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik, partai Demokrat memilih untuk turun kelapangan dan menyapa masyarakat secara langsung untuk memberikan informasi mengenai paslon yang mereka usung. DPC Partai Demokrat menganggap bahwa hal tersebut suatu langkah yang konkrit untuk menjalankan fungsi partai sebagai sarana komunikasi politik agar mengurangi tingkat apatisme masyarakat dan membuat masyarakat berkeinginan untuk memilih.

Adapun dalam hal fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, partai Demokrat sebenarnya sudah menjalankan fungsinya dengan baik hal ini, terlihat dari keterwakilan kader mereka dalam lembaga Legislatif Kabupaten Musi Banyuasin karena partai Demokrat memiliki 3 (tiga) perwakilan di kursi DPRD Kabupaten Musibanyuasin. Hanya saja partai Demokrat membutuhkan kaderisasi yang lebih maksimal lagi agar memunculkan kader-kader yang lain yang juga siap bersaing dalam kontestasi Pilkada maupun Pileg.

⁸ Wawancara dengan Sekretaris Jendral DPC Partai DEMokrat Kabupaten Musi Banyuasin Bpk Oekto Feriansyah. Pada 14 Mei 2019, pukul 16: 16 WIB

Dalam hal fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik partai Demokrat dengan 3 (tiga) perwakilannya yang ada di lembaga legislatif tentu memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan jika terjadi suatu konflik baik antar masyarakat maupun pemerintah dengan masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa partai Demokrat cukup lemah dalam hal rekrutmen politik, karena DPC Partai Demokrat Kabupaten Musi Banyuasin belum melakukan kaderisasi secara maksimal, serta memberikan tingkatan-tingkatan pendidikan terhadap kader sehingga pengurus ranting dari partai belum bisa secara maksimal mensosialisaikan apa-apa yang menjadi program yang dijanjikan oleh paslon yang mereka usung. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat pemahaman dari pengurus ranting partai terhadap informasi-informasi yang diperoleh oleh pengurus cabang maupun pusat.

Partai politik pengusung pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi yang lainnya yaitu Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) sebenarnya sudah melakukan proses kaderisasi partai dan rekrutmen yang cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya keterwakilan partai PKB dalam lembaga legislatif yang berjumlah 5 (lima) kursi, itu artinya bahwa PKB hanya membutuhkan 4 (empat) kursi saja untuk bisa mencalonkan kadernya sendiri pada Pilkada Musi Banyuasin 2017.

Dengan rekrutmen yang baik ini dan memiliki kader-kader yang siap bersaing seharusnya partai PKB memiliki kepercayaan diri untuk berkoalisi dengan partai yang lain untuk mencalonkan kadernya. Namun ternyata dengan

pertimbangan hasil survei serta partai-partai yang lain yang memutuskan mengusung paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi membuat PKB juga ikut serta dalam koalisi tersebut.

Adapun dalam hal sosialisasi politik dengan kader-kader yang berkualitas partai PKB mengaku bahwa mereka mensosialisasikan paslon yang mereka usung tersebut kepada pengurus, kader dan dengan konstituen PKB se-Kabupaten Musi Banyuasin meskipun dalam kenyataannya peneliti tidak menemukan dokumen-dokumen atau berita yang berkenaan dengan kampanye politik DPC Partai PKB pada Pilkada Musi Banyuasin 2017, hal ini berbeda dengan partai-partai lain yang peneliti temukan dokumennya serta berita-beritanya dimedia masa.

Dari permasalahan tersebut dapat dipahami bahwa partai PKB meskipun sudah memiliki kader yang cukup baik namun belum maksimal dalam hal sosialisasi politik. Dalam hal komunikasi politik DPC Partai PKB juga tidak melakukan komunikasi politik secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepercayaan mereka yang cukup tinggi terhadap paslon yang mereka usung karena dalam dalam beberapa kali survei paslon yang mereka usung selalu menang.

Dalam hal fungsi partai politik sebagai pengendali konflik sekretaris DPC Partai PKB Bpk Rusdi Nasir mengatakan bahwa:

“kami dari DPC Partai PKB Kabupaten Musi Banyuasin bersama dengan pengurus Kecamatan dan desa siap menjadi penengah jika

saja terjadi konflik di Kabupaten Musi Banyuasin baik konflik vertikal maupun horizontal.”⁹

Dari penyampaian sekretaris jendral DPC Partai PKB tersebut dapat disimpulkan bahwa DPC Partai PKB siap melaksanakan fungsinya sebagai pengendali konflik dengan cara menginstruksikan kepada kader-kadernya baik Kecamatan maupun desa untuk menjadi penengah disetiap konflik yang terjadi di masyarakat.

Sementara itu, partai Hanura yang juga sebagai partai pengusung pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik juga mensosialisasikan paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi ditingkat internal maupun eksternal partai guna untuk menarik simpatisan masyarakat agar memilih Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai, selain itu partai Hanura juga mengharapkan kepada masyarakat untuk memilih (tidak golput).

Apa yang dilakukan oleh partai Hanura tersebut sudah cukup baik dalam hal sosialisasi politik karena partai Hanura ketika menemui masyarakat bukan hanya mensosialisasikan paslon yang mereka usung saja melainkan juga mensosialisasikan bagaimana pentingnya datang ke TPS untuk memilih atau memberikan kontribusinya untuk daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sementara dalam hal rekrutmen politik partai Hanura juga cukup baik karena partai Hanura memiliki perwakilan sebanyak 5 (lima) kursi di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, hanya saja partai Hanura kurang baik dalam hal

⁹ Wawancara dengan Sekretaris Jendral DPC Partai PKB Kabupaten Musi Banyuasin, Bpk Rusdi Nasir pada 25 April 2019, pukul 01 :40 WIB

komunikasi politik dengan partai yang lain karena tidak mampu membentuk koalisi yang lain diluar paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi. Sementara dalam hal pengendali konflik partai Hanura juga mengaku siap untuk menyelesaikan berbagai konflik dimasyarakat karena hal itu merupakan salah satu tugas dari partai politik yang harus dilaksanakan.

Dari ke 6 (enam) partai pengusung paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi diatas dapat dipahami bahwa penyebab rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin 2017 disebabkan oleh beberapa hal yaitu: *pertama*, sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai pengusung paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi hanya dilaksanakan secara maksimal pada saat Pilkada atau Pileg saja sementara diluar dari agenda tersebut hampir-hampir setiap partai pengusung tersebut tidak memiliki agenda yang mengikutsertakan masyarakat.

Sehingga sosialisasi politik yang diakui oleh partai pengusung sebagai sarana untuk membuat visi dan misi adalah sesuatu yang formalitas saja karena sebenarnya partai politik dan koalisinya sudah memiliki visi dan misi tersendiri. Sehingga menurut mereka yang mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan visi misi merupakan sesuatu yang tidak mereka lakukan, karena tanya jawab pada saat sosialisasi politik berlangsung merupakan sesuatu yang formalitas saja.

Kedua, partai-partai pengusung pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi memiliki pola yang sama dalam hal mensosialisasikan program merka kepada masyarakat bahkan terkadang mereka melakukan agenda kunjungan kepada

masyarakat dengan bersama-sama padahal jika setiap partai memiliki pola sosialisasi yang berbeda-beda dan ditugaskan diposisi yang berbeda-beda tentu akan menghasilkan perolehan suara yang lebih baik lagi untuk paslon yang mereka usung. Pola yang sama yang dilakukan oleh beberapa partai pengusung paslon Dodi Reza dan Beni Hernedi hanya akan menimbulkan kejenuhan dari masyarakat sehingga meskipun sosialisasi itu dilakukan secara berulang-ulang tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat.

Ketiga, kepercayaan diri dari partai pengusung pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi yang terlalu tinggi menyebabkan beberapa partai politik tersebut tidak melakukan fungsi partai politiknya secara benar sehingga dengan jumlah sumberdaya manusia yang besar karena diusung oleh 11 (sebelas) partai tidak bisa menghasilkan suara yang maksimal disebabkan karena kepercayaan diri partai politik tersebut.

Keempat, tidak adanya keberanian dari partai politik untuk membuat koalisi diluar pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi menyebabkan persaingan pada Pilkada Musi Banyuasin 2017 tidak seimbang, karena disatu sisi paslon diusung oleh 11 (sebelas) partai sementara paslon yang lainnya maju secara independen. Adanya ketidak seimbangan kompetisi tersebut menyebabkan masyarakat apatis terhadap pemilihan kepala daerah 2017 karena sudah pasti diketahui siapa yang akan keluar menjadi pemenangnya. Keempat poin tersebut menurut peneliti merupakan penyebab dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Musi Banyuasin 2017.